

**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN BIBIT KELAPA SAWIT DI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
(Studi Kasus Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur)**

**Oleh :Bella Penderi**

[beila.penderi@student.unri.ac.id](mailto:beila.penderi@student.unri.ac.id)

**Pembimbing :Abdul Sadad, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

***Abstract***

*Implementation is an activity carried out by an agency or organization in a planned, organized and directed manner in order to achieve the expected goals. Therefore the Kuantan Singingi Regent issued a decree Number: Kpts.107 / V / 017 regarding technical guidelines for the distribution of oil palm seedlings in Kuantan Singingi Regency Government 2017 budget year. The purpose of this study was to determine the Implementation of Oil Palm Seed Assistance Program in Kuantan Singingi District (case study of standard operating procedures) and to find out the factors that constrained the Implementation of Oil Palm Seed Assistance Program in Kuantan Singingi District (case study of operational standard implementation procedure). The concept of the theory that the author uses is the theory of program definition by Charles O. Jones in Suryana (2009: 28) with organizing, interpretation, application or application. This study uses qualitative research methods with descriptive data review. In collecting data, the authors use interview and documentation techniques using the purposive sampling method as a source of information and use interactive models of analysis as a source of validity of the data. The results of this study indicate that the implementation of the Oil Palm Seed Assistance Program in Kuantan Singingi District (a case study of implementing standard operating procedures) is seen that the organization has not been optimal, the interpretation of the Department of Agriculture has not run effectively, and its implementation has not been able to overcome the implementation of the program. Factors that constrain the implementation of the Oil Palm Seed Assistance Program in Kuantan Singingi District (case study of standard operating procedures) are the Limitations on Human Resources and Budget Limitations.*

***Keywords: Management, Actuating, Program Implementation in SOP***

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peranan sektor pertanian semakin strategis karena sektor pertanian mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap devisa Negara dan satu-satunya sektor ekonomi yang mampu bertahan ditengah krisis ekonomi, dengan adanya otonomi daerah saat ini daerah harus mandiri dalam memanfaatkan potensi daerah maka sektor pertanian dapat memberikan kontribusi yang sangat bermakna terhadap kemampuan daerah dalam memperbesar kemampuan pembiayaan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Riau berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan mengingat tanahnya yang subur. Salah satunya yaitu Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi adalah instansi pemerintah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dengan berbagai permasalahan yaitu semakin tingginya alih fungsi lahan, Menurunnya kesuburan lahan pertanian, Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi, dan menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Sektor pertanian terdiri dari subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan.

Sebagian besar tanaman perkebunan tersebut merupakan usaha perkebunan rakyat, sedangkan sisanya diusahakan oleh perkebunan besar, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Komoditas pertanian pada subsektor perkebunan yaitu

karet, kakao, kelapa, kelapa sawit dan lain sebagainya. Salah satu komoditi pada sub sektor perkebunan yang mendapat perhatian pemerintah adalah tanaman kelapa sawit.

Pembangunan perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkesinambungan. Perkebunan kelapa sawit yang di kelola oleh rakyat tersebut masih di kelola secara sub sistem dengan teknologi yang sederhana dan produktivitas lahannya masih rendah.

Program bibit kelapa sawit merupakan salah satu program pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat guna meningkatkan kehidupan masyarakat dengan pemberian bantuan bibit kelapa sawit. Program bibit kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi yang mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum mampu mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit. Program bibit kelapa sawit mulai dilaksanakan pada Tahun 2017. Dengan diadakan program tersebut mampu meningkatkan kehidupan masyarakat dengan berkebun khususnya perkebunan kelapa sawit.

Penetapan petani peserta pada kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian (bantuan bibit kelapa sawit) pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun anggaran 2017 berdasarkan keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 326/XI/2017. Program Bibit kelapa sawit yang merupakan visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat pada Tahun 2017 dimana bibit yang diberikan kepada masyarakat 40 % mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh beragam penyakit diantaranya, mati pucuk, penyakit daun dan lain sebagainya.

Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyelenggarakan pemberian bantuan bibit senantiasa memerlukan keterpaduan dan sinkronisasi antara proses kerja pemerintah dengan kepentingan publik sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terkonsentrasi pada upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan efektif sehingga penting dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat standar operasional prosedur kerja (SOP) secara tepat dan sesuai rencana. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintahan, hal tersebut dapat ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat.

Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan program bantuan bibit kelapa sawit. Berdasarkan SK penerima bantuan bibit kelapa sawit dijelaskan bahwa bibit yang akan diberikan kepada masyarakat atau kelompok tani itu adalah bibit yang bermutu. Tetapi pada tahun 2017 bibit yang diberikan

kepada masyarakat bibit yang tidak bermutu. dapat dilihat dari saat pembagian bibit, bibit yang dibagikan 40 % rusak diakibatkan oleh mati pucuk, penyakit daun.

Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan SK yang ditetapkan yang sudah di sebutkan dalam Standar Operasional Prosedur membuat masyarakat yang mendapatkan bantuan bibit kelapa sawit merasa kecewa dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Padahal program bantuan bibit kelapa sawit ini merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dikemudian hari. kalau bibit yang diberikan kepada masyarakat tidak bermutu bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya dikemudian hari kalau bibit yang diberikan saja mengalami kerusakan.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis menetapkan fenomena yang terjadi alasan ketertarikan penulis untuk penelitian lebih lanjut pelaksanaan program bantuan bibit kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus pelaksanaan standar operasional prosedur), dalam hal ini fenomena yang terjadi yaitu:

1. Pemberian bantuan bibit kelapa sawit tidak sesuai dengan standar operasional prosedur.
2. Bibit kelapa sawit yang diberikan kepada kelompok tani 40 % rusak.

### **“Pelaksanaan Program Bantuan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur)**

#### **1.2. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan permasalahan pokok penelitian yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur) ?
2. Apa Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Program Bantuan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur)?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, Mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam Pelaksanaan Program Bantuan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur).
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala Pelaksanaan Program Bantuan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur).

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini untuk diberbagai pihak adalah:

1. Manfaat praktisnya adalah penelitian ini diharapkan berguna bagi bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang, seperti Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi khususnya dalam melaksanakan Program Bantuan Bibit Kelapa Sawit.
2. Manfaat Teoritisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian di bidang Administrasi Publik, terutama untuk pengembangan teori-teori

manajemen, pelaksanaan dan defenisi program.

## 2. KONSEP TEORI

### 2.1. Manajemen

**Sikula dalam Hasibuan (2014:2)** Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, penogorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sebagai sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

**Terry dalam Ruslan (2011:13)** mendefenisikan manajemen sebagai sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Menurut **Sapre dalam Usman (2014:6)** menyatakan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan langsung untuk penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut **Sidirjdo dalam Manullang (2012:3)** fungsi manajemen meliputi : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), pengawasan (*controlling*).

### 2.2. Pelaksanaan (*actuating*)

Menurut **Bahrudin (2015:162-201)** pelaksanaan merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenaan

berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Pelaksanaan atau penggerak merupakan fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Agar pelaksana berjalan dengan baik dan lancar maka diperlukan beberapa hal yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan/pekerjaan yaitu adanya kepemimpinan, motivasi dan komunikasi.

**Terry dalam Hajar (2016: 17)** mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Menurut **Dimock** dalam **Tachjan (2006)** pelaksanaan suatu tindakan yang telah diatur dan kemudian dilaksanakan oleh tim dalam pencapaian tujuan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana (Planning)  
Menetapkan tujuan dan sasaran dari rencana, kemudian berdasarkan hasil analisis perumusan kebijakan ditentukan kebijakan administrator yang bersifat ke dalam sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.
2. Organisasi  
Dengan melalui tindakan ini akan di terbentuk organisasi (bisa berbentuk tim) yang siap untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan

pengorganisasian, tenaga manusia, alat, tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata kerja di tata sedemikian rupa sehingga dapat digerakkan untuk melaksanakan kegiatan.

### 3. Pengawasan

Dalam mengembangkan metode-metode dan prosedur yang dibutuhkan termasuk cara untuk terus menerus mampu meninjau hasil sewaktu pelaksanaan itu di dalam pelaksanaan.

## 2.3 Defenisi Program

**Sujianto (2008:32)** program adalah suatu kompleks dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, posedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas dan langkah-langkah yang harus diambil. Sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah tindakan tertentu.

**Charles O. Jones** dalam **Suryana (2009:28)** berpendapat bahwa ada tiga pilar aktivitas dalam melaksanakan program yaitu :

1. Pengorganisasian  
Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam melaksanakan program sehingga tenaga pelaksana dapat dibentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi  
Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Penerapan atau Aplikasi  
Kesimpulannya program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan intruksi,

yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan agar hal tersebut dapat berjalan sesuai dengan tersistematik dan sesuai dengan tujuan awal dari program tersebut.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkap fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Karena, penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi. Dipilihnya daerah ini sebagai lokasi penelitian disebabkan karena Dinas pertanian merupakan Dinas yang melaksanakan suatu program bantuan bibit kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi guna meningkatkan perekonomian masyarakat yang mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN).

#### **3.3 Informan Penelitian**

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, informan penelitian diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Oleh karena itu peneliti menetapkan informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala subbagian program Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Kepala seksi Perbenihan dan Perlindungan Bidang Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Kasi Kelembagaan/ ketua Tim penerima Hasil Pekerjaan.
4. Kelompok Tani yang menerima program bibit kelapa sawit.

#### **3.4 Jenis Data dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan kata-kata atau tindakan orang yang diamati diwawancarai. Data primer langsung didapat dari informan dimana data tersebut meliputi :

1. Pelaksanaan program bantuan bibit kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017 dan 2018.
2. Untuk mengetahui penyebab dari tidak mampu memaksimalkan program bantuan bibit kelapa sawit oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Proses pemberian program bantuan bibit kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi
4. Informasi penting lainnya yang didapatkan peneliti melalui wawancara dan dokumentasi.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, seperti :

1. SOP pemberian bantuan bibit kelapa sawit Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi Dinas Pertanian
2. SOP pengajuan bantuan bibit kelapa sawit Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi
3. Rekapitulasi proposal bantuan bibit kelapa sawit tahun 2017

4. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.326/XI/2017 penetapan petani peserta pada kegiatan penyediaan sarana produksi Pertanian (bantuan bibit kelapa sawit) pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2017
5. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 107/V/2017 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan bibit kelapa sawit pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun anggaran 2017.
6. Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021
7. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang di gunakan diantaranya:

#### a. Wawancara (*Interview*)

Peneliti melakukan wawancara mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019 guna untuk mendapatkan data dan memahami pelaksanaan program bantuan bibit kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus pelaksanaan standar operasional prosedur).

#### b. Dokumentasi

Data yang diambil melalui dokumentasi, yang bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa file, foto dan lain sebagainya. Selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa dokumen publik (seperti

: koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen *private* (seperti : buku harian, diary, surat, e-mail).

### 3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas penalaran dan pengamatan lebih luas mengenai gejala-gejala dan informasi dari hasil penelitian. Hasil penelitian harus memulai proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. analisis data adalah mengurai dan megolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan dakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. Dalam analisis data peneliti menggunakan model analisis data interaktif. Model analisis interaktif yang dikemukakan oleh **Miles and Huberman** dalam **Rengkung (2015:158)**. Ada empat tahapan yaitu sebagai berikut :

#### 1. Pengumpulan data

Data penelitian kualitatif, proses pengumpulan data yang dilakukan sebelum penelitian dimulai, pada saat penelitian berlangsung dan sesudah penelitian selesai dilakukan. Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi.

#### 2. Reduksi data

Dalam reduksi data penulis memilah-milah data dan memadukannya kembali. Informasi yang diperoleh penulis akan dipilah mana yang sesuai dan yang tidak sesuai berkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti.

3. Penyajian data (display data)  
Penyajian data adalah tahapan penulis menyajikan informasi yang sudah direduksi menjadi sebuah tulisan atau tabel informasi yang dipilih dan disajikan dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk penjelasan uraian.
4. Kesimpulan  
Kesimpulan penelitian kualitatif mengarah kepada jawaban dan pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan mengungkapkan “what” dan “how” dari penelitian tersebut.

## **1. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1.1 Pelaksanaan Program Bantuan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur)**

#### **1. Pengorganisasian**

Pengorganisasian adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja kearah tujuan bersama. Dalam pengorganisasian, penyusunan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting agar setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut di ketahui dengan jelas tugas atau pekerjaan, tanggung jawab, hak dan wewenang.

Berkaitan dengan hal tersebut yang dimaksud dengan pengorganisasian dalam penelitian ini adalah dalam mengatur orang-orang dan sumber daya yang ada di di Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dapat menghasilkan struktur organisasi yang jelas sesuai dengan tanggung jawab nya masing-masing. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas

dalam menjalankan suatu program akan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan bibit kelapa sawit berdasarkan standar operasional prosedur di Kabupaten Kuantan Singingi saat ini masih kurang optimal, baik dari segi jumlah, penempatan tugas sumber daya manusia maupun dari segi anggaran.

#### **2. Interpretasi**

Dalam suatu program Para pelaksana harus mampu menjalankan suatu program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang di harapkan dapat tercapai . juklak dan juknis adalah pokok-pokok dan rujukan bagi arah kebijakan dan program segala bidang dalam rangka melakukan perubahan yang mengarah kepada pembaharuan peningkatan dan penyempurnaan terhadap mekanisme dan sistem struktur secara substansi dan aksiden.

Dengan diterbitkannya petunjuk teknis penyaluran bantuan bibit kelapa sawit Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun anggaran 2017, pelaksana program dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun harus berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. dengan tersusunnya petunjuk teknis penyaluran bantuan bibit kelapa sawit Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017, diharapkan kegiatan bantuan pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan terselesaikan tepat pada waktunya.

Berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan program bantuan bibit kelapa sawit Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi belum

berjalan secara efektif berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya.

### **3. Penerapan atau Aplikasi**

Program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan intruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan agar hal tersebut dapat berjalan dengan tersistematik dan sesuai dengan tujuan awal dari program tersebut. Untuk itu perlu dibahas mengenai sejauh mana Dinas Pertanian sebagai pelaksana dalam melakukan tindakannya agar tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam pelaksanaan program bantuan bibit kelapa sawit intruksi yang ada dalam Standar Operasional Prosedur yang di tetapkan dapat mengatasi penyimpangan yang dilakukan dalam melaksanakan program bantuan bibit kelapa sawit.

Standar Operasional Prosedur menjadikan suatu kebijakan dalam berjalannya suatu program agar berjalan secara sistematis dan sesuai dengan rencana. Jika dalam menjalankan program tidak mengikuti petunjuk SOP otomatis dalam pelaksanaan suatu program tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika kebijakan yang sudah di buat atau diputuskan oleh pemerintah tidak dijalankan seperti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Maka tujuan awal dari suatu program itu tidak akan tercapai.

#### **1.2 Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program bantuan bibit kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi**

#### **(studi kasus pelaksanaan standar operasional prosedur)**

##### **1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program bantuan bibit kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus pelaksanaan standar operasional prosedur). Misalnya kurangnya sumber daya membuat pekerjaan jadi terhambat sehingga pemberian bantuan bibit kelapa sawit tidak maksimal, sehingga dalam menyelenggarakan suatu program jadi tidak efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan suatu program guna meningkatkan perekonomian masyarakat sangat diperlukan aparatur pemerintah yang memiliki sumber daya manusia yang handal, untuk itu dapat dikatakan keberhasilan suatu penyelenggaraan program yang maksimal. Untuk melatih dan meningkatkan keahlian yang dimiliki perlu dilakukan pelatihan atau pembinaan kepada para pegawai guna meningkatkan kemampuan sumber dayanya, memperkaya wawasan, disiplin, terampil dalam menghadapi beban kerja yang semakin hari semakin berat guna mencapai hasil yang memuaskan.

##### **2. Keterbatasan Anggaran**

Anggaran adalah biaya yang dibutuhkan untuk program bantuan bibit kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi. Anggaran yang digunakan untuk program bibit kelapa sawit ini dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi. Sampai saat ini anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program bibit kelapa sawit ini terbatas dan tidak mencukupi untuk

pembelian bibit yang lebih berkualitas. Selain APBD, kurangnya anggaran membuat program bibit pada tahun 2018 tidak tersalurkan karena tidak adanya dana untuk penyediaan bibit terlebih dahulu, padahal program bibit kelapa sawit harus melakukan pemesanan terlebih dahulu untuk memastikan ketersediaan bibit.

## **PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan informan serta analisa peneliti dan semua indikator yang telah di sajikan pada bab sebelumnya, mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus pelaksanaan standar operasional prosedur) maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi pengorganisasian yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan program bantuan bibit kelapa sawit berdasarkan pelaksanaan standar operasional prosedurnya adalah penempatan kerja tidak sesuai dengan tugas yang diberikan. Menyebabkan pemberian bantuan bibit kelapa sawit yang sudah ditetapkan dalam SOP tidak sesuai dengan SK bantuan bibit kelapa sawit. Sehingga program bantuan bibit kelapa sawit yang berpedoman dengan Standar Operasional Prosedur belum optimal.
2. Interpretasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan program bantuan bibit kelapa sawit berdasarkan Standar Operasional

Prosedurnya adalah petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program bantuan bibit sawit belum efektif dan efisien. Bibit yang diberikan kepada kelompok tani tidak sesuai dengan petunjuk teknis, karena bibit yang dibantu bibit yang tidak bermutu yang saat dibagikan banyak yang rusak.

3. Dari segi Penerapan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan program bibit kelapa sawit belum mampu mengatasi pelaksanaan programnya, dikarenakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam SK pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam menjalankan programnya tidak berdasarkan dengan Standar Operasional Prosedurnya. Menyebabkan program pemberian bantuan bibit kelapa sawit yang tujuan awalnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tidak terlaksana sesuai tujuan karena bibit yang diberikan tidak berkualitas.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus pelaksanaan standar operasional prosedur), maka peneliti memberikan saran mengenai hasil penelitian. Bahwa untuk pelaksanaan program bibit kelapa sawit berdasarkan dengan SOP nya maka perlu dilakukan :

1. Dalam pelaksanaan program bantuan bibit kelapa sawit Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, pegawai yang melaksanakannya sesuai dengan bidangnya. Yang lebih

- mengetahui seperti apa bibit yang sesuai spesifikasi. Agar saat pembagian bibit tidak ada bibit rusak yang dibagikan kepada masyarakat.
2. Juknis dan juklak Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan program bibit dijalankan dengan sebaik mungkin, agar pemberian bibit dapat dengan konsisten berdasarkan dengan standar operasional prosedurnya.
  3. Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi yang melaksanakan program bibit kelapa sawit sesuai dengan Surat Keputusannya, agar tujuan dari awal program tersebut tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Wahhab, Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Badrudin. 2015. *Dasar- Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen., cetakan ke II*. Jakarta : Rajawali Pers
- Hani, T. Handoko. 2014. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFY-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Karding, A.K. 2008. *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang*. Tesis. Fisip Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kismono. 2010. *Pengantar Bisnis. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFY
- Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif "Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya"*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyono. 2008. *Manajemen administrasi & organisasi*

- pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, H. 2009. *Manajemen Strategik Organisasi Non-Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: UGM
- Relawati, Rahayu. 2012. *Dasar manajemen pendekatan aplikasi bidang pertanian*. Malang: UMM Press.
- Simamora, Henry. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia cetakan kedelapan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktik*. Pekanbaru : Alaf Riau
- Suryana. 2009. *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tachjan.(2006).*Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Terry. 2008. *Azas-Azas Manajemen, diterjemahkan oleh Winardi dari Principles of Mangement*. Bandung: Alumni
- Veitzal, Rivai. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : PT RinekaCipta
- Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Karya Ilmiah:**
- Fitri, Aldini. 2013. *Pelaksanaan Standar Operating Procedure (SOP) Sertifikasi Halal oleh Majelis ulama Indonesia (MUI) Riau (Studi Kasus usaha catering di kota Pekanbaru)*. Skripsi Administrasi Publik Universitas Riau; Pekanbaru
- Hajar, Siti. 2012. *Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Surat Tanah di Kantor Camat Sukajadi Kota Pekanbaru*. Skripsi Administrasi Publik Universitas Riau; Pekanbaru.
- Murniati. 2014. *Analisis implementasi standar operasional Prosedur (SOP) dalam Pengajuan Anggota Polisi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi putera 1912 Syariah*

*cabang Sidoarjo. Jurnal  
Administrasi Publik (JAP),  
Vol 1, No.2, hal. 174-180*

Html di akses pada tanggal  
06 Desember 2017 pukul  
10:14 WIB

**Dokumen:**

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 39 Tahun 2014  
tentang Perkebunan

Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor 35 Tahun 2016  
Tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas  
Dan Fungsi Serta Tata  
Kerja Dinas Pertanian  
Kabupaten Kuantan  
Singingi

Keputusan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor : Kpts.326/XI/2017  
penetapan petani peserta  
pada kegiatan penyediaan  
sarana produksi Pertanian  
(bantuan bibit kelapa  
sawit) pemerintah  
Kabupaten Kuantan  
Singingi tahun anggaran  
2017

Keputusan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor : Kpts. 107/V/2017  
tentang petunjuk teknis  
penyaluran bantuan bibit  
kelapa sawit pemerintahan  
Kabupaten Kuantan  
Singingi Tahun anggaran  
2017.

**Website:**

[https://www.goriau.com/Berita/Kuantan-Singingi/Terkait-Penyaluran-Bantuan Bibit-Sawit-Wabup-Kuansing-Halim-40-Persen-Rusak](https://www.goriau.com/Berita/Kuantan-Singingi/Terkait-Penyaluran-Bantuan-Bibit-Sawit-Wabup-Kuansing-Halim-40-Persen-Rusak).

<https://www.riau-mandiri.co/Read/Detail/61381/Penyaluran-Bantuan-Bibit-Sawit-Di-Kuansing-Tertunda-Ini-Penyebabnya>  
di akses pada tanggal 01  
Agustus 2018 pukul 16:39  
WIB

<https://riauone.com/Riau/Penyaluran-Bibit-Sawit-Tahun-2018-Terkendala-Plt-Kadis-Pertanian-Tetap-Berusaha-Tersalurkan> di  
akses pada tanggal 07  
September 2018 pukul  
05:55 WIB